

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manajemen bencana merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, dan menangani dampak bencana melalui tahapan prabencana, saat bencana, dan pascabencana. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi guna melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Salah satu bentuk penting dalam manajemen bencana adalah mitigasi bencana, yaitu upaya untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana, khususnya bencana banjir yang sering terjadi di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi karena kondisi geografis, hidrologis, dan curah hujan yang tinggi, sehingga banjir menjadi salah satu bencana yang paling sering terjadi setiap tahun (Herawati et al., 2022).

Manajemen bencana berbasis komunitas (MBBK) merupakan pendekatan strategis dalam penanggulangan bencana yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai aktor utama, bukan hanya sebagai penerima bantuan. Konsep ini berasal dari prinsip-prinsip pengembangan berkelanjutan dan ketahanan komunitas, yang diadopsi dari kerangka kerja internasional seperti *Hyogo Framework for Action (2005-2015)* dan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030)*, yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di Indonesia, MBBK diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menekankan partisipasi masyarakat dalam mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan bencana.(UNDRR, 2015).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, konsep *Community-Based Disaster Risk Management* (CBDRM) atau Manajemen Bencana Berbasis Komunitas (MBBK) menjadi pendekatan strategis dalam pengelolaan risiko bencana. Menurut (Wisner & Wisner, 2004), risiko bencana merupakan hasil interaksi antara bahaya alam, kerentanan sosial-ekonomi, dan kapasitas masyarakat. Melalui model *Pressure and Release* (PAR), risiko dapat ditekan melalui pengurangan kerentanan dan peningkatan kapasitas lokal. Dengan demikian community based disaster risk management, (CBDRM) menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pelibatan masyarakat seringkali masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya mampu mendorong kemandirian komunitas dalam menghadapi risiko bencana.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana banjir. Secara geografis, Kabupaten Bojonegoro berada pada kawasan dataran rendah yang dilalui oleh Sungai Bengawan Solo sebagai sungai terpanjang di Pulau Jawa. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa wilayah di Bojonegoro sering mengalami banjir, terutama ketika curah hujan tinggi dan debit air Sungai Bengawan Solo meningkat. Luapan sungai menjadi penyebab utama terjadinya banjir di kawasan permukiman masyarakat, khususnya di wilayah yang berada di bantaran sungai.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, banjir menjadi salah satu bencana yang paling sering terjadi setiap tahun dan berdampak pada berbagai kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, penelitian Herawati et al. menjelaskan bahwa Kabupaten Bojonegoro termasuk daerah dengan tingkat risiko bencana yang cukup tinggi karena memiliki potensi multi bencana, terutama banjir luapan Bengawan Solo dan banjir bandang.

Secara geografis, Kabupaten Bojonegoro berada pada kawasan dataran rendah yang dilalui oleh Sungai Bengawan Solo sebagai sungai terpanjang di Pulau Jawa. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa wilayah di Bojonegoro sering mengalami banjir, terutama ketika curah hujan tinggi dan debit air Sungai Bengawan Solo meningkat. Luapan sungai menjadi penyebab utama terjadinya banjir di kawasan permukiman masyarakat, khususnya di wilayah yang berada di bantaran sungai.

Gambar 1.
Peta Rawan Bencana Kabupaten Bojonegoro



Sumber Data: Data diolah dari [BPBD Kabupaten Bojonegoro](#)

Gambar di atas menunjukkan bahwa kondisi geografis Kabupaten Bojonegoro yang berada pada dataran rendah dan dilalui Sungai Bengawan Solo menjadi faktor utama tingginya potensi banjir di wilayah tersebut. Selain

dipengaruhi oleh curah hujan tinggi, peningkatan debit air Sungai Bengawan Solo juga menyebabkan luapan air ke kawasan permukiman masyarakat. Data kejadian banjir memperlihatkan bahwa banjir masih menjadi bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bojonegoro dan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, serta lingkungan bagi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya mitigasi bencana yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengurangi risiko banjir, khususnya di wilayah rawan seperti Kelurahan Ledok Wetan dan Ledok Kulon.

Kelurahan Ledok Wetan dan Ledok Kulon memiliki tingkat kerentanan yang tinggi karena berada pada elevasi rendah ($\pm 20\text{--}30$ meter di atas permukaan laut) dengan kondisi topografi yang landai. Ketika debit Sungai Bengawan Solo meningkat hingga lebih dari $10.000\text{ m}^3/\text{detik}$ pada musim hujan, wilayah ini kerap mengalami genangan luas yang berdampak pada permukiman, infrastruktur, serta fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko banjir tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam, tetapi juga oleh keterbatasan kapasitas mitigasi di tingkat lokal.

Banjir yang terjadi di kawasan ini juga dipengaruhi oleh degradasi lingkungan di sepanjang DAS Bengawan Solo. Tingginya sedimentasi sungai yang mencapai $5\text{--}10$ juta m^3 per tahun menyebabkan pendangkalan, sementara erosi tebing dan pencemaran limbah domestik memperburuk kondisi lingkungan. Selain itu, alih fungsi lahan di wilayah hulu yang tidak terkendali turut meningkatkan risiko banjir (Rahardjo, 2023).

Kerentanan banjir di Kabupaten Bojonegoro juga dapat dilihat dari perkembangan tinggi muka air Sungai Bengawan Solo yang terus mengalami peningkatan pada musim hujan. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops BPBD Kabupaten Bojonegoro) tanggal 20 Mei 2025, tinggi muka air Bengawan Solo di wilayah Bojonegoro mengalami kenaikan dari 13,53 meter pada pukul 00.00 WIB menjadi 14,60 meter pada pukul 10.00 WIB. Ketinggian tersebut telah melampaui batas Siaga 3 (Merah) yang ditetapkan pada elevasi 14,04 meter. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Sungai Bengawan Solo berada pada status siaga merah dengan tren kenaikan muka air yang berpotensi menimbulkan luapan ke wilayah permukiman di bantaran sungai, termasuk kelurahan Ledok Wetan dan Ledok Kulon. Data ini memperlihatkan bahwa ancaman banjir di wilayah penelitian bukan hanya bersifat potensial, tetapi merupakan kondisi nyata yang terjadi secara berulang dan memerlukan upaya mitigasi yang lebih optimal (BPBD Kabupaten Bojonegoro, 2025).

Gambar 2.
Kondisi Luapan Di Kawasan Ledok Kulon Dan Ledok Wetan



Sumber Data: Foto Berita blokbojonegoro, 2024

Dampak banjir di kelurahan Ledok Wetan dan Ledok Kulon sangat signifikan, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan, sehingga banjir

menyebabkan kerugian besar akibat gagal panen dan rusaknya lahan. Selain itu, masyarakat juga mengalami kehilangan tempat tinggal sementara dan harus mengungsi dengan keterbatasan logistik(Ernie Tisnawati Sule & Saefullah, 2005). Tingginya kerentanan banjir di kelurahan Ledok Wetan dan Ledok Kulon dapat dilihat dari kejadian banjir yang terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Banjir tersebut menyebabkan banyak kepala keluarga terdampak, meluasnya area genangan, serta menimbulkan kerugian material bagi masyarakat. Adapun data kejadian banjir di kelurahan Ledok Wetan dan Ledok Kulon tahun 2024–2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.
Data Kejadian Banjir
di Kelurahan Ledok Wetan dan Ledok Kulon Tahun 2024–2025

Tahun/Bulan	Kejadian	Lokasi	Tinggi Air (m)	KK Terdampak	Luas Genangan (ha)	Kerugian (Rp Miliar)
Maret 2024	Luapan Sungai	Ledok Wetan	2–3	800	200	2,2
Jan 2025	Hujan ekstrem	Ledok Wetan/Kulon	0,3–0,4	1.200	150	1,8
Feb 2025	Debit tinggi	Ledok Wetan	1–2	900	180	1,2
Mei 2025	Siaga merah	Kedua desa	14,39	1.500	270	3,3

Sumber Data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, 2024–2025.

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa banjir di Kelurahan Ledok Wetan dan Ledok Kulon terjadi secara berulang dan menimbulkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Tingginya jumlah kepala keluarga terdampak, luas genangan, serta kerugian material menunjukkan bahwa kedua desa memiliki

tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana banjir. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya mitigasi bencana sebagai langkah untuk mengurangi risiko dan dampak banjir yang terjadi setiap tahun. Menurut Herawati et al. (2022), mitigasi bencana merupakan upaya yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana guna meminimalkan risiko serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir.

Namun, berdasarkan kondisi di lapangan, pelaksanaan mitigasi bencana berbasis komunitas di Kelurahan Ledok Wetan dan Ledok Kulon masih belum optimal. Kegiatan mitigasi seperti pelatihan dan sosialisasi kebencanaan hanya pernah dilakukan satu kali di Kelurahan Ledok Kulon, tepatnya di TK Muslimat dengan melibatkan sekitar 55 anak, sedangkan di Kelurahan Ledok Wetan belum pernah dilaksanakan kegiatan serupa. Selain itu, simulasi bencana banjir juga belum pernah dilakukan di kedua desa. Padahal, simulasi bencana menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap proses evakuasi dan penanganan saat bencana terjadi (Azizah, 2018). Kondisi tersebut apabila dikaitkan dengan Teori Manajemen Bencana menurut Carter (1991), menunjukkan bahwa tahapan mitigasi belum terlaksana secara optimal karena mitigasi tidak hanya berkaitan dengan upaya fisik untuk mengurangi risiko bencana, tetapi juga memerlukan peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Oleh karena itu, keterbatasan sosialisasi, pelatihan, dan simulasi kebencanaan menunjukkan masih perlunya penguatan mitigasi berbasis komunitas di kedua kelurahan tersebut.

Kondisi kesiapsiagaan masyarakat juga masih menghadapi beberapa kendala, seperti lambatnya masyarakat menerima informasi bencana, keterbatasan kecepatan evakuasi warga, serta belum optimalnya respons aparat desa dalam menangani laporan bencana. Sistem peringatan dini (Early Warning System) yang digunakan masyarakat masih terbatas pada informasi kenaikan debit air Sungai Bengawan Solo. Selain itu, belum terdapat kejelasan mengenai keberadaan sirine bencana maupun informasi titik kumpul evakuasi yang diketahui masyarakat secara menyeluruh. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kesiapsiagaan masyarakat dan sistem peringatan dini menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko bencana. Jika dikaitkan dengan Teori Manajemen Bencana Carter (1991), kondisi tersebut menunjukkan bahwa tahap kesiapsiagaan masih perlu diperkuat, karena kesiapsiagaan menuntut adanya kemampuan masyarakat untuk menerima informasi, memahami prosedur penyelamatan, serta melakukan tindakan secara cepat dan terorganisasi sebelum maupun ketika ancaman bencana terjadi. Dengan demikian, belum meratanya pemahaman mengenai sistem peringatan dini, titik kumpul, dan jalur evakuasi menjadi salah satu kesenjangan antara kondisi empiris dengan kesiapsiagaan yang diharapkan dalam manajemen bencana.

Pada tahap pemulihan pascabencana, penguatan ketahanan komunitas juga masih perlu diperhatikan. Program pascabencana yang berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat, evaluasi mitigasi, maupun pembentukan komunitas siaga bencana masih belum terlihat secara optimal di wilayah penelitian. Padahal, pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga

pada penguatan kemampuan masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana di masa mendatang (Ulum, 2013). Hal tersebut sejalan dengan Teori Manajemen Bencana Carter (1991) dan Coppola (2006) yang menempatkan pemulihan sebagai bagian dari proses manajemen bencana yang berkelanjutan. Dengan demikian, pemulihan seharusnya tidak berhenti pada perbaikan lingkungan dan pemberian bantuan, tetapi juga diarahkan pada penguatan kapasitas dan ketahanan komunitas agar masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang.

Upaya mitigasi yang telah diarahkan oleh BPBD Bojonegoro meliputi pemantauan kenaikan tinggi muka air Sungai Bengawan Solo, penyampaian informasi secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, serta peningkatan kesiapsiagaan di wilayah bantaran sungai. BPBD juga mengimbau camat dan kepala desa/kelurahan di daerah rawan banjir untuk melakukan pemantauan dan menyampaikan informasi secara rutin agar penanganan dampak banjir dapat dilakukan lebih cepat. Jika dikaitkan dengan Teori Manajemen Bencana, kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan mitigasi dan kesiapsiagaan karena bertujuan mengidentifikasi perkembangan ancaman serta memberikan informasi awal kepada masyarakat sebelum dampak banjir semakin luas. Pemantauan dan penyampaian informasi tersebut juga menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat lebih cepat menerima informasi bencana dan meminimalkan dampak banjir yang terjadi di wilayah rawan banjir Kabupaten Bojonegoro.

Gambar 3.
Pemantauan dan Pengukuran Debit Air Bengawan Solo



Sumber Data : detikdetikcomtahun2024

Debit air Sungai Bengawan Solo menjadi salah satu faktor penting yang diperhatikan dalam upaya mitigasi banjir, khususnya di kawasan Desa Ledok Wetan dan Ledok Kulon Kabupaten Bojonegoro. Debit air menunjukkan besarnya volume air yang mengalir di sungai dalam waktu tertentu. Ketika curah hujan tinggi terjadi di wilayah hulu maupun sekitar daerah aliran sungai, debit air Bengawan Solo dapat meningkat dan berpotensi menyebabkan luapan air ke permukiman, lahan pertanian, serta fasilitas umum masyarakat. Oleh karena itu, pemantauan tinggi muka air sungai menjadi langkah penting untuk mengetahui tingkat kewaspadaan terhadap potensi banjir.

Berdasarkan data pemantauan BPBD Kabupaten Bojonegoro, status tinggi muka air Bengawan Solo dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu Siaga 1 (Hijau) pada ketinggian 12,06 meter, Siaga 2 (Kuning) pada 13,06 meter, dan Siaga 3 (Merah) pada 14,04 meter. Apabila tinggi muka air melewati batas tersebut, maka potensi terjadinya luapan air di wilayah bantaran sungai, termasuk Desa Ledok Wetan dan Ledok Kulon, akan semakin besar. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa pemantauan debit air memiliki peran penting dalam mendukung sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir.

Komunitas merupakan kelompok masyarakat yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki hubungan sosial, kepentingan, serta tujuan bersama dalam menghadapi risiko bencana. Dalam penelitian ini, komunitas masyarakat di Desa Ledok Wetan dan Ledok Kulon memiliki peran penting karena kedua desa berada di kawasan rawan banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo. Tingginya intensitas banjir yang terjadi pada tahun 2024–2025 menunjukkan bahwa masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak ketika debit air sungai meningkat. Bahkan berdasarkan data BPBD Kabupaten Bojonegoro, banjir di kedua desa menyebabkan ribuan kepala keluarga terdampak serta menimbulkan kerugian material yang cukup besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya mitigasi banjir.

Peran komunitas dalam mitigasi bencana dapat dilakukan melalui kerja sama antarwarga, penyampaian informasi peringatan dini, pemantauan kondisi sungai, hingga kegiatan gotong royong membersihkan saluran air dan lingkungan sekitar sungai. Namun, berdasarkan hasil penelitian, mitigasi berbasis komunitas di Desa Ledok Wetan dan Ledok Kulon masih belum berjalan optimal. Saat ini kegiatan mitigasi yang dilakukan di wilayah penelitian masih sangat terbatas. Berdasarkan hasil observasi awal, sosialisasi dan pelatihan kebencanaan hanya pernah dilaksanakan satu kali di Kelurahan Ledok Kulon dengan melibatkan sekitar 55 anak di TK Muslimat, sedangkan di Kelurahan Ledok Wetan belum

pernah dilaksanakan kegiatan serupa. Selain itu, simulasi evakuasi banjir sebagai bagian dari upaya mitigasi juga belum pernah dilakukan di kedua desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman banjir masih belum berjalan secara optimal. Padahal, mitigasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko bencana serta tindakan yang harus dilakukan sebelum bencana terjadi (BNPB, 2017).

Permasalahan lain yang ditemukan adalah masih rendahnya tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir. Hal ini terlihat dari masih lambatnya penerimaan informasi kebencanaan oleh masyarakat, belum optimalnya proses evakuasi ketika debit air meningkat, serta masih terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur penyelamatan diri saat terjadi banjir. Selain itu, sebagian masyarakat juga belum mengetahui lokasi titik kumpul evakuasi maupun jalur evakuasi yang dapat digunakan saat kondisi darurat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesiapsiagaan masyarakat sebagai elemen penting dalam manajemen bencana masih perlu ditingkatkan. Keberadaan sistem peringatan dini (*Early Warning System*) juga masih menjadi persoalan di wilayah penelitian. Informasi yang diterima masyarakat sebagian besar hanya berasal dari pemantauan kenaikan debit air Sungai Bengawan Solo dan informasi yang disampaikan secara informal oleh perangkat desa maupun warga sekitar. Hingga saat ini belum terdapat sistem peringatan dini yang terintegrasi dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Selain itu, informasi mengenai keberadaan sirine bencana maupun mekanisme penyebaran peringatan dini juga belum dipahami

secara merata oleh masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi menghambat kecepatan respons masyarakat ketika banjir terjadi.

Penelitian ini menggunakan teori manajemen bencana (*Disaster Management Theory*) yang menjelaskan bahwa penanggulangan bencana dilakukan melalui tahapan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Dalam teori tersebut, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketahanan komunitas terhadap ancaman banjir. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana implementasi mitigasi bencana berbasis komunitas di Kelurahan Ledok Wetan dan Ledok Kulon, khususnya pada aspek mitigasi, kesiapsiagaan masyarakat, serta upaya pemulihan pascabencana dalam menghadapi risiko banjir di kawasan rawan bencana Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian mengenai mitigasi bencana banjir sebelumnya lebih banyak membahas strategi pemerintah dan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanganan bencana. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada kebijakan pemerintah, sistem peringatan dini, serta penanganan darurat bencana banjir. Sementara itu, penelitian yang membahas keterlibatan masyarakat dan manajemen bencana berbasis komunitas masih relatif terbatas, khususnya pada wilayah rawan banjir di Kabupaten Bojonegoro. Padahal, masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung kesiapsiagaan, penyebaran informasi, hingga proses evakuasi saat bencana terjadi. Oleh karena itu, penelitian di Kelurahan Ledok Wetan dan Ledok Kulon menjadi penting dilakukan karena kedua wilayah tersebut termasuk kawasan yang sering terdampak banjir akibat

luapan Sungai Bengawan Solo dan memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap bencana banjir.

Penelitian ini difokuskan pada manajemen bencana berbasis komunitas karena keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko bencana banjir. Partisipasi masyarakat dan penguatan kapasitas komunitas diperlukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mempercepat penyampaian informasi bencana, serta mendukung proses evakuasi saat banjir terjadi. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi mitigasi bencana berbasis komunitas, bentuk kesiapsiagaan masyarakat, serta upaya penguatan ketahanan komunitas dalam menghadapi risiko banjir di kawasan Desa Ledok Wetan dan Ledok Kulon Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan kondisi di lapangan, terdapat beberapa alasan yang mendorong perlunya penelitian ini dilakukan. Pertama, Desa Ledok Wetan dan Desa Ledok Kulon merupakan wilayah yang secara geografis berada pada kawasan rawan banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo, sehingga setiap tahun masyarakat di kedua desa tersebut selalu terdampak banjir dengan berbagai bentuk kerugian, baik material maupun nonmaterial. Kedua, upaya mitigasi bencana berbasis komunitas di kedua desa tersebut masih belum berjalan secara optimal, yang ditunjukkan oleh masih minimnya kegiatan sosialisasi kebencanaan, belum terlaksananya simulasi atau latihan kesiapsiagaan bencana secara berkala, serta terbatasnya implementasi sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi banjir. Ketiga, keterlibatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana masih perlu ditingkatkan agar mampu

membentuk kemandirian dan ketahanan komunitas dalam menghadapi bencana banjir yang berulang setiap tahun.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, dapat diketahui bahwa tingginya risiko banjir di Desa Ledok Wetan dan Ledok Kulon tidak hanya disebabkan oleh faktor geografis dan luapan Sungai Bengawan Solo, tetapi juga dipengaruhi oleh masih terbatasnya kapasitas masyarakat dalam melakukan mitigasi bencana. Minimnya kegiatan sosialisasi dan simulasi kebencanaan, belum optimalnya sistem peringatan dini, rendahnya kesiapsiagaan masyarakat, serta terbatasnya program penguatan komunitas pascabencana menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal manajemen bencana berbasis komunitas dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan manajemen bencana berbasis komunitas dalam mitigasi banjir di Kelurahan Ledok Wetan dan Ledok Kulon Kabupaten Bojonegoro. Untuk mengkaji secara lebih mendalam pelaksanaan manajemen bencana berbasis komunitas dalam mitigasi banjir di kawasan tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Manajemen Bencana Berbasis Komunitas dalam Mitigasi Banjir di Kawasan DKelurahan Ledok Wetan dan Ledok Kulon ”**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicari jawabannya. Arikunto, (2013) mengatakan, “Perumusan masalah dapat dilakukan dengan cara merumuskan judul selengkapnya. Namun demikian walaupun tampaknya masalah sudah

dituangkan dalam bentuk judul, pembaca dapat menafsirkan dengan arti yang berbeda dengan maksud peneliti.” Penulis dapat menarik garis besar bahwa perumusan masalah bertujuan agar maksud penulis dan pembaca sama, tidak berbeda paham.

Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2023a). Rumusan masalah juga dapat dikatakan sebagai hal-hal yang akan diteliti oleh penulis, dan merupakan penggambaran hubungan Antarvariabel.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti memfokuskan permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini yaitu:

Bagaimana Manajemen bencana Berbasis Komunitas Dalam Mitigasi Bnajibir di Kawasan Kelurahan Ledok Wetan dan Ledok Kulon Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Manajemen bencana Berbasis Komunitas Dalam Mitigasi Bnajibir di Kawasan Kelurahan Ledok Wetan dan Ledok Kulon Kabupaten Bojonegoro.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian

efektivitas kebijakan publik di tingkat daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai Manajemen bencana Berbasis Komunitas Dalam Mitigasi Bnafir di Kawasan Kelurahan Ledok Wetan dan Ledok Kulon Kabupaten Bojonegoro

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi Akademik, Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengajaran dan penelitian lanjutan, di mana temuan tentang Manajemen bencana dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum administrasi publik untuk membahas isu keberlanjutan komunitas.
- 2) Untuk Mahasiswa dan Pembaca, Penelitian ini menjadi referensi akademik dan bahan kajian dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya terkait Manajemen bencana berbasis komunitas dalam mitigasi banjir. .

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis menerangkan dalam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari pendahuluan dimana penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengemukakan tentang tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang relevan, pendapat para ahli dan hasil dari penelitian

terdahulu, digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan.

BAB III :METODE PENELITIAN

Pada bab ini mengemukakan tentang metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, informan dan teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, manajemen data dan metode analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi kan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian berisi gambaran umum objek penelitian, data penelitian, analisa dan interpretasi data, temuan penelitian yang disajikan dalam topik sesuai dengan pertanyaan pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Pembahasan berisi tentang keterkaitan antara pola pola, kategori kategori dan dimensi dimensi, teori yang ditemukan terhadap teori teori temuan sebelumnya, serta intepretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

BAB V :PENUTUP

Bab ini berisikan temuan studi berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut